

LAPORAN PENGURUS PUSAT AP3Knl TAHUN 2014

DAAM RAKER SOLO (15-16 FEBRUARI 2014)

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum wr.wbr.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak Gubernur Kepala Daerah Prov Jawa Tengah ysh.

Bapak Wali Kota Solo ysh.

Bapak Dekan FKIP UNS ysh.

Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat AP3Knl, Prof Dr. Udin S Winataputra ysh.

Para Pimpinan Pengurus Wilayah AP3Knl untuk wilayah Jateng, Sulsel, Jabar, Papua, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah ysh.

Panitia penyelenggara Raker, Pengurus Wilayah AP3Knl Jawa Tengah , ysh.

Hadirin peserta raker AP3Knl dari seluruh pelosok tanah air khususnya para ketua program studi, dosen, guru, dan pemerhati PPKn dari seluruh Indonesia, ysh.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa.

Saya atas nama Pengurus Pusat AP3Knl mengucapkan selamat datang di kota Solo, kota yang bersejarah dan telah berkontribusi bagi perkembangan PKn di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam raker serta komitmennya dalam membangun dan memajukan PPKn di bumi Indonesia tercinta ini. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, Pengurus Wilayah AP3Knl Jawa Tengah sebagai Panitia Penyelenggara kegiatan Rapat Kerja AP3Knl tahun 2014, merupakan raker pertama di luar kota Bandung. Ini kehormatan yang layak diberikan karena di wilayah Solo inilah, tepatnya di Tawangmangu pernah dirumuskan istilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dari kota inilah telah lahir Doktor PKn Pertama, lulusan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, yakni DR. Triyanto (mohon berdiri). DR Triyanto adalah Doktor PKn pertama di Indonesia.

AP3Knl lahir dengan latar belakang semangat dan cinta terhadap bangsa dan negara dalam bingkai NKRI melalui kendaraan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Kedudukan PKN menjadi sangat penting di bumi Pancasila yang memiliki kebhinnekaan luar biasa. Tidak ada negara yang menyamai Indonesia di planet bumi ini.

Berdirinya AP3Knl diawali dengan diskusi kecil namun bercita-cita besar bertempat di kampus Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung yang diwujudkan dengan peristiwa Deklarasi yang dihadiri oleh tidak kurang 80 orang yang terdiri dari para ketua program studi, dosen, guru, dan pemerhati PPKn dari seluruh Indonesia pada tanggal 22 Desember 2010 dan pengesahan draf AD ART pada esok harinya, yakni tanggal 23 Desember 2010. Dengan semangat, semua yang hadir mengucapkan deklarasi dan komitmen untuk berhimpun dalam wadah asosiasi dan bertekad untuk menjaga, mengembangkan, dan memajukan PPKn di Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Pada tahun 2011, AP3Knl tepatnya tanggal 23 Juli 2011 telah mengadakan musyawarah nasional dengan acara membahas AD/ART asosiasi dan pemilihan pengurus AP3Knl Pusat. Pada saat itu, secara musyawarah dan mufakat telah terpilih formatur yang diberi tugas menyusun Susunan Pengurus Pusat Periode 2012 – 2017. Berdasarkan hasil keputusan rapat tim formatur, terbentuklah Susunan Pengurus Pusat dan Struktur Organisasi Pengurus AP3Knl Wilayah serta Pembagian 13 Pengurus Wilayah berdasarkan pertimbangan kebijakan Dikti tentang Pembinaan Perguruan Tinggi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI ASOSIASI PROFESI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

(AP3Knl)

I. Tingkat Pusat

A. Dewan Pembina Pusat

1. Ketua Dewan Pembina : Prof. Dr. Endang Sumantri, M.Ed
2. Sekretaris Eksekutif : Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si
3. Anggota :
 1. Prof. Dr Idrus Affandi, SH
 2. Prof. Dr. A. Azis Wahab, MA
 3. Prof. Dr. Endang Danial, M.Pd
 4. Prof. Numan Somantri, MSc,Ed
 5. Prof. Dr. Astim Riyanto, SH, MH
 6. Prof. Dr. Syamsi Pasandaran, M.Pd
 7. Prof. Dr. Tukiran, M.Pd
 8. Prof. Dr. Azwar Ananda MA
 9. Freddy Kalidjernih, Ph.D
 10. Prof. Ace Suryadi, M.Sc. Ph.D

B. Dewan Pengurus Pusat :

1. Pengurus Harian

1	Ketua Umum	Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra, MA	UT UNJ
2	Ketua Bidang I Keilmuan dan Keprofesian	Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, SH., M.Pd	UPI
3	Ketua Bidang II Keorganisasian	Prof. Dr Wahyu., M.Si	UNLAM
4	Ketua Bidang III Kemitraan dan Usaha	Prof. Dr.Dasim Budimansyah, M.Si	UPI
5	Sekretaris Jenderal	Prof. Dr. Sapriya, M.Ed	UPI
6	Sekretaris I	Dr. Prayoga Bestari, M.Si	UPI
7	Sekretaris II	Drs. Dadang Sundawa, M.Pd	UPI
8	Sekretaris III	Dr. Asep Mahpudz, M.Si	UN Tadulako Palu
9	Bendahara Umum	Dr. Sunatra RS, SH.,M.Si	UPI
10	Wakil Bendahara I	Dra. Iim Masyitoh, M.Si	UPI
11	Wakil Bendahara II	Dra. Tati Hatimah	UIN Jak
12	Wakil Bendahara III	Dr. Sri Haryati, M.Pd	UNS

2. Sekretariat

	Koordinator	Susan Fitriasari, M.Pd	UPI
	Anggota	Leny Anggraeni, M.Pd	UPI
	Anggota	Runik Machfiroh, M.Pd	Univ Telkom
	Anggota	Asep Dahliyana, M.Pd	UM Malang
	Anggota	Dede Iswandi, S.Pd	UPI

3. Bidang – Bidang

1	Bidang Keilmuan dan Keprofesian		
a	Divisi Kurikulum dan Pembelajaran	Prof. Dr. Aim Abdulkarim, M.Pd	UPI
		Drs. Encang Ahmadin, M.Pd	(Kepala SMAN 3 Bandung)
		Drs. Rahmat, M.Si	UPI
		Dra. Lily Nurlaeli, MA	PUSKURBUK
		Drs. Kusnadi, M.Si	FKIP UT
b	Divisi Riset dan Pengembangan	Dr. Kokom Komalasari, M.Pd	UPI
		Dr. Hermana Somantrie, MA	PUSKURBUK
		Drs. Komarudin, M.Si	Dekan FIS UNJ
		Drs. Maftuhin Ridha, M.Pd	UPI
2	Bidang Keorganisasian		
a	Pengembangan dan Koordinasi	Dr. Cecep Darmawan, S.Pd, S.IP., M.Si	UPI
		Drs. Hasan Suryono, SH, MH, M.Pd	UNS

		Dr. Acep Supriadi, M.Pd	UNLAM
b	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dr. Yadi Ruyadi, M.Si	UPI
		Drs. Nana Karyana	LPMP
		Yuyus Kardiman, M.Pd	UNJ
		Syaifullah, M.Si	UPI
3	Bidang Kemitraan dan Usaha		
a	Pendanaan	Dr. Elly Malihah, M.Si	UPI
		Dra.Etin Solehatin, M.Pd	Ketua Prodi.PPKn UNJ
		Drs. H. Wahab Sudinata, MM, MH	Kepala SMAN Raja Galuh
		Drs. Purnomo Ananto, MM	POLMED
		Drs. Yahya Arwiyah, SH.,MH	Univ Telkom
b	Kemitraan Profesional	Prof. Dr. Karsadi, M.Si	UNHALU Kendari
		Drs. Arif Ahmad, M.Pd	Ketua MGMP JABAR
		Lukman Surya Saputra, M.Pd	Guru SMPN Bandung

II Tingkat Wilayah

Dewan Pembina Wilayah :

1. **Ketua Dewan Pembina**
2. **Sekretaris Eksekutif**
3. **Anggota terdiri dari 10 orang**

Dewan Pengurus Wilayah :

A. **Pengurus Harian Wilayah**

1. **Ketua Umum**
2. **Ketua Bidang I : Keilmuan dan Keprofesian**
3. **Ketua Bidang II : Keorganisasian**
4. **Ketua Bidang III : Kemitraan dan Usaha**
5. **Sekretaris Jenderal**
6. **Sekretaris I**
7. **Sekretaris II**
8. **Sekretaris III**
9. **Bendahara Umum**
10. **Wakil Bendahara**

B. **Bidang – Bidang**

1. **Bidang Keilmuan dan Keprofesian**
 - a. **Divisi Kurikulum dan Pembelajaran**
 - b. **Divisi Riset dan Pengembangan**
2. **Bidang Keorganisasian**
 - a. **Pengembangan dan Koordinasi Wilayah**
 - b. **Sumber Daya Manusia**
3. **Bidang Kemitraan dan Usaha**
 - a. **Pendanaan**
 - b. **Kemitraan Profesional**

1. Wilayah Medan mencakup Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara

: Dr. Deny Setiawan, M.Si (UNIMED)

2. Wilayah Padang mencakup Sumatera Barat, Riau dan Kepri : Drs.Zahirman, MH.

3. Wilayah Palembang mencakup Sumsel, Jambi, Bengkulu dan Lampung :

: Dr. Adelina Hasyim, M.Pd (UNILA)

4. Wilayah DKI dan Banten mencakup DKI dan Banten :

: Dr. Ahmad Husein, SH., M.Si (UNJ)

5. Wilayah Jawa Barat

: Drs. Rahman Mulyawan, M.Si (UNPAD)

6. Wilayah Jawa Tengah

: Dr. Triyanto, SH.MH (UNS)

7. Wilayah DIY

: Dr. Syamsuri, M.Si (UNY)

8. Wilayah Jawa Timur

: Dr Nurul Zuriah, M.Si (UMM)

9. Wilayah Nusa Tenggara mencakup Bali, NTB, dan NTT :

: Prof. Dr. Sukadi, M.Ed (UNDIKSA)

10. Wilayah Kalimantan mencakup Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng:

: Prof. Dr. Eddy Lion (UNPAR)

11. Wilayah Sulawesi mencakup Sulsel, Sultra, Sulteng, Gorontalo dan Sulut :

: Prof. Dr. Asnawi Haris, M.Si (UNM)

12. Wilayah Maluku mencakup Maluku dan Maluku Utara

: Drs. Abdul Jabar Abdul, M.Si (UMAmbon)

13. Wilayah Papua mencakup Papua dan Papua Barat : **Elisa Gaspersz, M.Pd (UNCEN)**

Selain menghasilkan sejumlah keputusan, musyawarah pun menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

REKOMENDASI MUSYAWARAH

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SE-INDONESIA

Pertimbangan :

1. Bahwa nomenklatur pendidikan kewarganegaraan yang saat ini dipakai dalam Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS telah ditafsirkan secara tidak tepat dan

secara substansial dianggap belum mewadahi nilai-nilai Pancasila walaupun sesungguhnya isi pendidikan kewarganegaraan pada semua jenjang pendidikan memuat dengan tegas substansi Pancasila.

2. Bahwa dirasakan ada kesenjangan antara pelaksanaan PKn di lapangan dengan tuntutan yang sangat dinamis terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menimbulkan kesan bahwa pembelajaran PKn belum optimal.
3. Bahwa sumber belajar yang digunakan selama ini terkesan belum mengakomodasi kearifan lokal sebagai dampak dari kebijakan perbukuan nasional yang bertumpu pada persepsi masyarakat perkotaan di Jawa dan kurang berempati terhadap keberagaman sosial budaya di seluruh Indonesia.
4. Bahwa masih dirasakan rendahnya motivasi berkarir sebagai guru PKn yang profesional sebagai dampak dari lingkungan yang lebih cenderung menerapkan ukuran – ukuran materi yang pada gilirannya menimbulkan rendahnya kualitas pembelajaran PKn di lapangan.

Rekomendasi :

Memperhatikan keempat pertimbangan tersebut dan didorong oleh keinginan untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam peningkatan peran pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dengan ini kongres asosiasi profesi PKn menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- A. Frasa pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS sudah tepat dipakai sebagai nama jenis (ditulis dalam huruf kecil) baik untuk bidang kajian keilmuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi maupun sebagian mata pelajaran/matakuliah di satuan pendidikan yang mewadahi nilai-nilai Pancasila. Sedangkan penggunaan frasa pendidikan kewarganegaraan sebagai nomenklatur untuk nama program studi atau nama mata kuliah tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penamaan mata kuliah/mata pelajaran dapat diatur secara tersendiri.
- B. Untuk mengatasi kesenjangan antara pelaksanaan PKn di lapangan dengan tuntutan yang sangat dinamis terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, diperlukan komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan satuan pendidikan untuk memfasilitasi

peningkatan kemampuan pendidik PKn dalam memanfaatkan teknologi komunikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

- C. Sumber belajar yang digunakan selama ini perlu mengakomodasi kearifan lokal melalui desentralisasi sistem perbukuan, sehingga keberagaman sosial budaya Indonesia yang merupakan aset bangsa dapat diakomodasikan dalam sumber belajar PKn.
- D. Rendahnya motivasi berkarir sebagai guru PKn perlu ditingkatkan melalui pembinaan guru dalam jabatan (*in service training*) dan memberikan akses yang luas kepada semua guru PKn untuk secara kreatif meningkatkan kualitas, kompetensi, profesionalisme guru PKn atas prakarsanya sendiri dan mendapat apresiasi penuh dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pada tahun 2012, AP3Knl mengadakan seminar dan rapat kerja tepatnya pada tanggal 29 Maret 2012 di Bandung yang menghasilkan rencana kerja.

RENCANA KERJA

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA (ASOSIASI PPKn) TAHUN 2012-2013

No.	KEGIATAN SRATEGIS	KEGIATAN OPERASIONAL	ANCANGAN WAKTU	
			2012	2013
1.	PENGUATAN JATIDIRI ASOSIASI PROFESI PPKn	• Pembuatan atribut organisasi (Lambang, Bendera, Jaket, Pin dll)		
		• Pengurusan Akta Notaris Asosiasi PPKn		
		• Pembuatan Kartu Anggota Asosiasi		
		• Pembentukan Pengurus Daerah Asosiasi PPKn (Surat Mandat, inisiatif daerah)		
		• Rintisan Paket Sertifikasi		

		Guru PPKn		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian Tulisan/Siaran di media Massa secara perseorangan/kelembagaan • Pembuatan Website Asosiasi atau dengan rintisan Portal "Asosiasi PPKn On-Line" 		
2.	PENGUATAN EPISTEMOLOGI PPKn	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Jurnal Asosiasi (1) "CIVILITY-INDONESIANA 2045" (English) ; Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Indonesia) • Kemitraan Bestari Program Magister dan Doktor PKn • Konferensi Nasional Dua - Tahunan PPKn 		
3.	PENGUATAN AKSIOLOGI PPKn	<ul style="list-style-type: none"> • Lomba Keunggulan Pembelajaran PPKn • Tranformasi Belajar PPKn: Civic Culture • Lomba Kewarganegaraan Partisipatif • Rintisan Sertifikasi Profesi Guru PPKn • Advokasi Profesional PPKn oleh Pengurus Daerah: Sertifikat Kompetensi • Pengembangan Situs Kewarganegaraan 		
4.	PERLUASAN JARINGAN KEMITRAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan dg Pemerintah/Pemerintah Daerah • Kemitraan dengan lembaga Internasional • Dialog Nasional Prodi PPKn/IPS • Kemitraan dengan Asosiasi Profesi lain (ISPI, HISPISI) 		
5.	PENCARIAN SUMBER DANA	<ul style="list-style-type: none"> • Iuran Anggota dg Proporsi untuk Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat (60: 40) • Penerbitan <i>Handbook</i> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan • Biding Penelitian dan Pengembangan PPKn • Penerbitan Monograf, Buku Teks, Buku Ajar PPKn. 		
6.	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • 		

Berdasarkan rencana kerja tersebut, Pengurus Pusat telah membuat surat mandat kepada perwakilan wilayah yang ada di 13 wilayah. Umumnya surat mandat disambut baik dan hingga saat ini telah terbentuk delapan Pengurus Wilayah dengan 7 pengurus wilayah telah dikukuhkan yakni:

1. Pengurus Wilayah Jawa Tengah
2. Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan
3. Pengurus Wilayah Jawa Barat
4. Pengurus Wilayah Jawa Riau
5. Pengurus Wilayah Jawa Papua
6. Pengurus Wilayah Jawa Sumatera Barat
7. Pengurus Wilayah Jawa Kalimantan Selatan
8. Pengurus Wilayah Sulawesi Tengah

Namun, sejumlah program kerja dalam rencana kerja di atas belum sepenuhnya terlaksana mengingat status asosiasi yang belum jelas saat itu. Oleh karena itu, pada awal tahun 2013, Pengurus Pusat mendaftarkan asosiasi di Notaris dan sekaligus mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia untuk mendapat pengesahan. Alhamdulillah, setelah menunggu selama kurang lebih delapan bulan akhirnya Akta Notaris dan Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan akhirnya diperoleh. Sehingga mulai tahun 2013 akhir, AP3Knl telah sah dan berdiri sebagai asosiasi legal untuk menjalankan program dan bekerja untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini, kita Pengurus Asosiasi Pusat dan wilayah tidak perlu ragu lagi untuk bergerak, bekerja mengabdikan untuk bangsa dan negara. Selamat bekerja. Mudah-mudahan niat baik dan mulia ini mendapat perlindungan dan ridha Allah, Tuhan yang Maha Esa. Amiin ya robbal alamin.

Wassalamu'alaikum wr.wbr.

Solo, 15 Februari 2014

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA.

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.